

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan dan kedudukan pegawai negeri sangat menentukan dalam setiap organisasi pemerintah sebab pegawai negeri itu sendiri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Akan tetapi di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya yang beraneka ragam itu banyak mengalami kendala karena masalah pegawai negeri adalah masalah manusia dengan berbagai macam tingkat kecakapan atau keahlian dan juga sifat-sifatnya.

Bahwa pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional telah diketahui dan diakui sejak lama. Kedudukannya sangat menentukan karena berhasil tidaknya tujuan pemerintah tergantung dari pada aparatur negaranya yaitu pegawai negeri.

Dalam zaman modern ini, kemajuan teknologi telah dapat menggantikan sebahagian besar tugas-tugas manusia. Pekerjaan dengan ketelitian dan resiko yang tinggi untuk diserahkan pada robot-robot. Demikian pula mengejar produksi maksimum. Tanpa mengenal waktu, fungsi mesin-mesin pekerja ini telah menggantikan tenaga manusia. Meskipun demikian faktor manusia tetap merupakan

faktor penentu dan pengambil keputusan akhir. Sesuai dengan apa yang dikatakan Arifin Abdulrachman bahwa : “Dalam suatu penyelenggaraan kerja maka manusialah yang menduduki tempat kerja yang vital. Teknik permesinan dapat ditingkatkan tetapi apabila tidak ada manusia yang menjalankan mesin-mesin maka mesin-mesin itu akan menjadi besi tua dan mati ”.¹

Sehingga tanpa manusia tujuan akan tetap tinggal tujuan belaka, bahkan dapat dipastikan bahwa organisasi ini sendiripun tidak mungkin ada.

Untuk kelancaran jalannya organisasi dalam usaha mencapai tujuan diperlukan adanya manajemen yang baik yaitu semua kegiatan didasarkan atas prinsip efektivitas kerja. prinsip seperti ini akan dapat dijalankan jika tenaga pelaksanaanya terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tergantung antara lain dari kesempurnaan para aparatur negara yang dalam hal ini pegawai negeri. Kesadaran akan pentingnya peranan pegawai negeri dalam pembangunan nasional yang memberikan perhatian tentang penyempurnaan pembinaan pegawai negeri seperti yang tertulis di bawah ini :

¹ Arifin Abdulrachman, *Persoalan Manusia Dalam Manajemen*, Majalah Administrasi Negara, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 23.